

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 32 tahun 2004 juga mendefenisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam ssitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/ atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis” direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia jelas telah diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku di Indonesia. Dan dapat dikaji dalam Landasan Konstitusi tersebut bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari asas desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 ini prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jelas otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus dijamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah

Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

2.2 Otonomi Desa

Menurut HAW. Widjaja (2012:4) Otonomi Desa merupakan sebuah harapan untuk Desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, Otonomi Desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada desa dan dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan atas apa yang diusahakan kekuasaan orde baru. Selain itu, gagasan ini memuat pula mengenai kontruksi desa masa depan, yaitu sebuah bentuk ideal yang hendak dicapai

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan persoalan yang tiada henti menjadi polemik diberbagai kalangan pemerintah, baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non- pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan porsi

otonomi kepada kabupaten/kota saja dan memposisikan desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pun belum memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri, karena hanya urusan-urusan publik yang bersifat mekanis saja yang diberikan kepada masyarakat desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 5 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan atau Pemerintah kabupaten.

2.3. Pemerintahan Desa

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah

dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang menjalankan peradilan (yudikatif).

Menurut C. F. Strong. (dalam Nurcholis Hanif, 2011:23) pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Sedangkan pengertian Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia (HAW.Widjaja, 2012:10).

Jadi pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang dan bersifat pengatur. Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga desa serta kerja sama antar desa.

2.4 Peran Pemimpin Informal

Pemimpin informal menurut Kartini Kartono (2011:110) adalah Orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau Masyarakat.

Adapun ciri-ciri pemimpin informal menurut Kartini Kartono (2011:110) antara lain:

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legalitas sebagai pemimpin
2. Kelompok rakyat atau Masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin.

3. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinan.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
5. Tidak dapat memutasikan dan tidak pernah mencapai promos, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memnuhi persyaratan formal tertentu.
6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, tidak diakui atau ditinggalkan oleh massanya.

Menurut Walgito (2003: 93) pemimpin informal adalah pemimpin yang mempunyai batasan-batasan tertentu dalam kepemimpinannya, disini dimaksud dengan pemimpin informal yaitu orang yang memimpin kelompoknya informal yang statusnya tidak resmi, pada umumnya tidak didukung oleh peraturan-peraturan yang tertulis seperti kelompok formal.

Adapun menurut Sarwono (2005:44) pemimpin informal adalah kepribadian seseorang yang timbul pada diri sendiri datangnya kewibawaan pribadi, sifat, bakat, karismatik yang khas terdapat pada diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan.

Telah dikemukakan bahwa tidak ada pemimpin tanpa adanya pihak yang dipimpin. Pemimpin timbul sebagai hasil dari persetujuan anggota organisasi yang secara sukarela menjadi pengikut. Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin.

Dari seorang pemimpin informal diharapkan adanya peran sosial tertentu yang apabila diaktivasi, akan berwujud partisipasi sosial.

Peranan menurut Soekanto (2007:212) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Di Desa Lereng Kecamatan Kuok kabupaten Kampar yang menjadi pemimpin informal adalah Pemuka adat (Ninik mamak). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemangku Adat (Ninik Mamak) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.

Peran pada tokoh adat (Ninik Mamak) yang ada di desa Lereng kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 pada pasal 10 yang mengatakan bahwa fungsi pemuka adat adalah:

- a. Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan.
- b. Mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat.

- c. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat kedudukan dan Peran Ninik Mamak menyatakan:

Pasal 4

kedudukan Ninik Mamak Godang Kanogoghi adalah penghulu suku yang telah dilantik dan dinobatkan dengan suatu rangkaian acara adat dalam persukuannya dan amenjadi anggota kerapatan adat pada Naghoi Wilayah Adat.

Pasal 5

Ninik Mamak Godang Kanogoghi dalam kabupaten kampar memiliki peran dalam upaya pembinaan terhadap segenap anak kemenakan dalam persukuan secara terus menerus selama yang bersangkutan dipercaya dan diakui untuk memangku jabatan penghulu suku (datuok).

Pasal 6

Ninik Mamak Godang Kanogoghi berkewajiban menurunkan kepututannya sebagai pucuk suku dan pemegang nilai dan norma adat kepada pucuk suku dikampung dan anak kemenakan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat pemberian insentif kepada Ninik Mamak sebagai penghargaan kepada Ninik Mamak atas pelayanan yang diberikan terhadap segenap anak kemenakan dan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pemangku adat dilingkungan kaumnya.

Besarnya insentif digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan dan pengayoman para Ninik Mamak Godang kanogoghi bagi segenap anak kemenakan dalam persukuan dan besarnya insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

2.5 Hubungan Kepemimpinan Informal dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan dan pembuatan keputusan atau pemimpin sangat erat kaitannya. Eratnya hubungan antara pembangunan dan pembuat keputusan atau pemimpin akan menjelaskan bahwa suatu pembaharuan atau inovasi merupakan faktor yang berhubungan dengan struktur kekuasaan. Pengaruh struktur kekuasaan terhadap pembangunan ditentukan oleh kategori kekuasaan para pemimpinnya.

Kepemimpinan yang berlandaskan tradisi, yaitu kepemimpinan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang mendalam seperti terlihat dari tokoh-tokoh dibidang kepercayaan. Para pemuka adat (ninik mamak) desa dianggap mewakili kepemimpinan yang berlandaskan tradisi.

Kepemimpinan di desa yang berasal dari berbagai kelompok tersebut sebenarnya mempunyai kategori tersendiri. Hanya beberapa kelompok yang mempunyai pengaruh sosial yang luas di kalangan masyarakat, yaitu mereka yang

tergolong mempunyai pengaruh yang sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum dan menyeluruh dan pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kondisi serta situasi setempat, dalam hal ini norma-norma sosial. Dengan demikian, penting untuk mengetahui proses pencapaian kedudukan kepemimpinan di desa yang dihubungkan dengan perkembangan desa.

Adapun hubungan Ninik Mamak dalam Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

2.5.1 Hukum Adat Pertanahan

Menurut Samosir Djamanat (2013:103) Hak ulayat terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga dan nagari. Kata “hak” mempunyai arti yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat.

Sedangkan menurut Van Vollenhoven (Samosir, 2013:117) hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat (suku, desa, sertifikat desa) untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya.

Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu.

Berdasarkan struktur masyarakat, hak ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum. Hak ulayat yang dikenal di kalangan

masyarakat hukum adat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur hukum perdata yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia. Unsur hukum publik, yaitu kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan dan penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.

Menurut van Vollenhoven (Samosir,2013:108) ada 6 (enam) tanda-tanda atau ciri-ciri hak ulayat, yakni sebagai berikut:

- a. Hanya persukuan hukum dan anggota-anggotanya yang adapat menggunakan tanah, berukar di dalam wilayahnya.
- b. Yang bukan anggota persekutuan dapat menggunakan hak itu, tetapi harus seizin dari persekutuan hukum tersebut.
- c. Dalam menggunakan hak itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar recognitie

- d. Persekutuan hukum mempunyai tanggungjawab terhadap kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat.
- e. Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selamanya kepada siapapun.
- f. Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanahnya yang telah digarap, misalnya dalam pembangian perkarangan atau dalam jual beli.

Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal, maupun yang didasarkan pada keturunan, yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati dusun, nagari dan sebagainya.

Mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat tanda-tanda yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya hak ulayat meliputi 3 unsur, yaitu :

- 1. Masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari
3. Hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan obyek Hak Ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan. Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tanah ulayat diatur oleh Ninik-Mamak.

Jika terjadi permasalahan dalam hak tanah ulayat maka disinilah peran Ninik Mamak diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat sebelum melalui jalur pengadilan, Namun seiring waktu masyarakat lebih percaya bahwa melalui jalur komunikasi antara yang bersengketa dan semua pihak yang terlibat lebih dapat menyelesaikan masalah sengketa yaitu melalui mediasi demi mencapai pembangunan yang lebih baik lagi.

2.5.2 Hukum Adat Keluarga

Menurut Samosir Djamanat (2013:267) hukum keluarga adalah kompleks kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, hubungan kekeluargaan ini mempunyai tempat yang sangat penting, karena merupakan faktor dalam susunan persekutuan hukum/masyarakat hukum, hukum perkawinan dan hukum waris.

Hubungan anak dengan keluarga atau kerabat tergantung dari cara bagaimana masyarakat menarik garis keturunan dan susunan masyarakat hukum. Sesuai dengan corak kemasyarakatan, hubungan anak dengan keluarga/kerabat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat Matrilineal

Pada tertib masyarakat hukum yang bercorak matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan seorang ibu, bahwa hubungan anak dengan keluarga pihak bapak dan pihak ibu tidak sama (berbeda).

Dalam hal ini, masyarakat desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar merupakan masyarakat matrilineal yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan seorang ibu.

2. Masyarakat Patrilineal

Dalam susunan kekerabatan yang bersiat patrilineal hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggap lebih penting derajatnya. Setelah perkawinan istri menjadi anggota dari pihak suaminya dan menetap pada pusat kediaman kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi hak bapak dan hak dari kerabat suaminya, yaitu termasuk dalam lingkungan kerabat bapaknya.

3. Masyarakat Bilateral

Pada umumnya, di masyarakat yang bercorak parental atau masyarakat yang menarik garis keturunan berdasarkan orang tua, bahwa hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak atau pihak keluarga pihak ibu adalah sama dan sederajat. Anak-anak menjadi hak bapak dan ibu bersama-sama dan termasuk dalam kerabat lingkungan, kerabat bapak, serta kerabat si ibu.

Kesatuan atas dasar keturunan di Desa Lereng disebut suku. Orang yang berada dalam satu kesatuan itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu mula-mula datang ketempat itu untuk membangun kehidupan.

Keturunan menurut Bushar Muhammad (2008:3) adalah: Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.

Keturunan dapat dilihat dari 2 sifat yaitu:

1. Lurus; dimana seseorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang lain.
2. Menyimpang atau bercabang; di mana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam satu ketunggalan leluhur.

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat-akibat dari suatu hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah semua sama. Sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Desa Lereng adalah sistem keturunan matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak perempuan, sistem ini dikenal dengan sebutan sistem keibuan.

2.5.3. Hukum Adat Waris

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat yang lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya.

Menurut Ter Haar (Samosir, 2013:305) Hukum adat waris adalah hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusuma (2003:91) Hukum adat warisan adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta itu dialihkan pengurusan dan pemilikannya dari pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan kepada ahli warisnya. Hukum waris sangat berhubungan sekali dengan keluarga karena bentuk dari perkawinan dan hukum keluarga, karena bentuk dari perkawinan dan sistem kekeluargaan akan sangat menentukan sekali susunan atau sistem keturunannya.

Unsur-unsur hukum waris adat, yaitu sebagai berikut:

1. Pewaris, sebagai subyek hukum waris, yaitu seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris
2. Ahli waris, subyek hukum waris, yaitu seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris
3. Harta atau warisan, objek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud benda
4. Proses penerusan dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal

dunia. Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama yang lain berbeda-beda.

Menurut Eman Suparman (2009:121) bahwa sistem kekeluargaan waris adalah bahwa setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. Sistem patrilineal

yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat penting, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian

masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

2. Sistem matrilineal

yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Sistem parental/bilateral

yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sederajat, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

2.6. Konsep Islam tentang Kepemimpinan dan Pembangunan

Kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi / berusaha, berbangsa dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, usaha, bangsa dan negara antara lain dipengaruhi oleh para pemimpinnya.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya.

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan.

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.(QS: Al-Ahzab ayat 21)

Dari ayat diatas telah dijelaskan didalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah merupakan pemimpin yang patut untuk dicontoh suri tauladannya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Dengan demikian seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW kiranya dapat dicontoh dalam kehidupan seorang manusia terutama memimpin dirinya sendiri dan memimpin anggota atau umat karena apabila seorang manusia tidak dapat memimpin dirinya sendiri maka niscaya akan rusaklah yang Dia pimpin serta akan membawa kerusakan dimuka bumi.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinana langit di muka bumi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.“

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan.

Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.

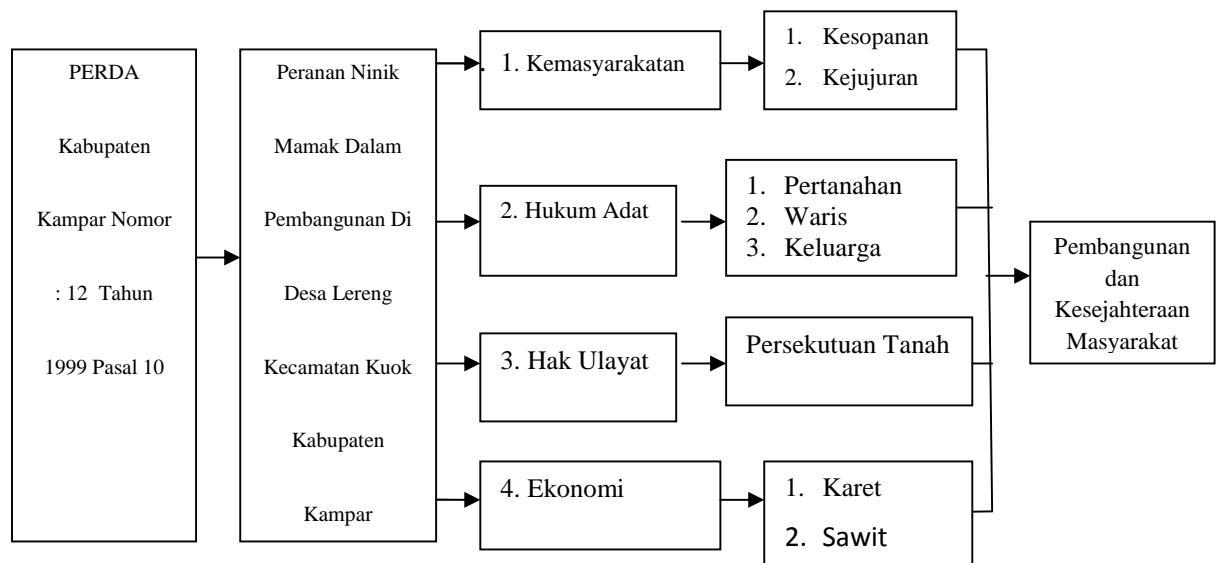
Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata . Konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. Oleh karena itu pula, menegakkan keadilan dinyatakan oleh Allah sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para rasul Allah.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ غَرِيظٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”(Al-Hadid:25)

2.7. Kerangka Pemikiran



2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang digambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan, mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat, mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat, menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.8. Konsep Operasional

2.8.1. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau deenisi yang gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995:46).melalui konsep panneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:

- a. Pemangku Adat (Ninik Mamak) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimipin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.
- b. Peran pada tokoh adat (Ninik Mamak) yang ada di desa Lereng kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 pada pasal 10 yang mengatakan bahwa fungsi pemuka adat adalah:
 - a) Membantu dalam bidang kemasyarakatan.

1. Kesopanan

Kesopanan di Desa Lereng menurut adat istiadat contohnya adalah anak gadis dilarang keluar malam,dalam hal ini sesuai dengan pepatah di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu Adat Besandi Syarak Syarak Besandi Kitabullah. kemudian jika bertamu ke rumah orang harus mengetok pintu terlebih dahulu. Selanjutnya contoh

lain dalam kesopanan adalah jika bertamu, seorang tamu duduk didekat pintu keluar dan tuan rumah duduk dekat dapur. Disini peran dari Ninik Mamak adalah memberikan pembekalan kepada anak kemenakan untuk mengetahui tentang adat kesopanan dalam adat istiadat yang ada di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Kejujuran

Kejujuran dalam hal ini adaah Ninik Mamak harus menanamkan nilai kejujuran kepada kemenakan-kemenakannya. Ninik mamak harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh terjadi perselisihan diantara sesama anak kemenakan maka disinilah peran Ninik Mamak diperlukan, Ninik Mamak harus berlaku adil dan tidak boleh memihak kepada anak kemenakannya.

b) Mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat.

1. Hukum adat Pertanahan

Peran dari Ninik Mamak di dalam Hukum Adat Pertanahan adalah Ninik Mamak berungsi sebagai mediator yang mana mediator menyiapkan persiapan untuk menyelesaikan Hukum Adat Pertanahan.

2. Hukum adat Waris

Dalam mengawasi Hukum Adat Waris di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tidak bisa terlepas dari peranan seorang Ninik Mamak, karena Ninik Mamak di dalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan mempunyai 5 (lima)

peran dalam pelaksanaan kepemimpinan yaitu: Sebagai anggota masyarakat, Sebagai bapak dalam keluarga, Sebagai seorang pimpinan (mamak) dalam kaum, Sebagai seorang sumando diatas rumah isterinya dan Sebagai seorang ninik mamak dalam negerinya.

3. Hukum adat Kelurga

Peran dari Ninik Mamak di dalam Hukum Adat Keluarga adalah contohnya didalam acara nikah kawin Ninik Mamak berfungsi jika dari salah satu dari mereka ingin menikah, maka harus mengikuti adat yang ada di desa tersebut.

- c) Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

1. Persekutuan Tanah

Didalam persekutuan tanah peran Ninik Mamak menyelesaikan sengketa tanah adalah bisa dilakukan dengan mediasi, dimana mediasi tersebut melakukan tahap yang Ninik Mamak menjadi meditaor didalam sengketa Tanah tersebut.

- d) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

1. Karet

Peran Ninik Mamak didalam memelihara dan memanfaatkan Karet untuk kesejahteraan anggota persekutuan adalah menjaga karet tetap

terpelihara dan tidak diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memelihara persekutuan anggota Ninik Mamak.

2. Sawit

Peran Ninik Mamak didalam memelihara dan memanfaatkan Karet untuk kesejahteraan anggota persekutuan adalah menjaga karet tetap terpelihara dan tidak diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memelihara dari persekutuan anggota Ninik Mamak.

- c. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinagn Masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia

2.8.2 Variabel Penelitian

Menurut Singarimbun (1995:46) definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan mengukur variabel.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan.

Tabel 2.1 : Operasional Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4
Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunan Sesuai dengan PERDA Kabupaten Kampar No.10 Tahun 1999 Pasal 10	1.Kemasyarakatan	a. Kesopanan b. Kejujuran	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	2. Hukum Adat	a. Hukum adat Pertanahan b. Hukum adat Keluarga c. Hukum adat Waris	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	3.Hak Ulayat	a. Menyelesaikan Masalah Persekutuan Tanah	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	4.Ekonomi	a. Memelihara Tanah Ulayat yang ditanam Karet b. Memelihara Tanah Ulayat yang ditanam Sawit	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik

Sumber : Data Olahan Penelitian 2014